

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Dinas Koperasi dan UKM DIY berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan mengambil objek penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi dan UKM DIY sudah cukup baik, namun ditemukan beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, terutama pada komponen penilaian risiko, dimana kegiatan identifikasi dan analisis risiko belum dilakukan secara memadai. Kelemahan lain yang ditemukan adalah permasalahan SDM subbagian keuangan yang belum mencukupi kebutuhan serta belum optimalnya pemisahan tugas dan fungsi dalam penyusunan laporan keuangan. Dinas Koperasi dan UKM DIY perlu meningkatkan pengendalian akses Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) serta melakukan perbaikan berkelanjutan atas keseluruhan komponen pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Laporan Keuangan, Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the government internal control system in preparing financial statements at the Department of Cooperatives and SMEs of The Special Region of Yogyakarta based on PP Number 60 of 2008 concerning Government Internal Control System (SPIP) and BPKP Regulation Number 5 of 2021 concerning Maturity Assessment of Integrated SPIP Implementation at Ministries/Agencies/Local Governments. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach and takes the object of research at the Department of Cooperatives and SMEs of The Special Region of Yogyakarta. The results showed that the implementation of the government internal control system in the preparation of financial statements of Department of Cooperatives and SMEs of The Special Region of Yogyakarta was quite good, but weaknesses were found, especially in the risk assessment component, where risk identification and analysis activities have not been adequately carried out. Another weakness found is the problem of insufficient human resources in the finance subdivision and the lack of optimal separation of duties and functions in preparing financial report. The Department of Cooperatives and SMEs of The Special Region of Yogyakarta needs to improve SIPD access control and continuously improve all components of internal control in the preparation of financial statements.

Keywords: Government Internal Control System (SPIP), Financial Statements, BPKP Regulation Number 5 of 2021.